



# RENCANA KERJA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, karunia dan bimbingan Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025. Kami sadar bahwa Renja ini sebagai dokumen dari Perangkat Daerah (PD) yang memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini kami berharap agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun kedepan sebagaimana program dan kegiatan yang tertuang didalamnya, sehingga akan dapat terukur target kinerja program kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renja ini, kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan Renja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi niat baik kita semua khususnya dalam melaksanakan tugas dibidang penanganan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Jepara, Amiin.

Jepara, 5 Juli 2024  
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN JEPARA



**SAMIADJI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690509 199102 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penyusunan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>TAHUN 2023</b> .....	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	61
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>63</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi...	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	66
3.3. Program dan Kegiatan.....	70
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>80</b>
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap OPD diwajibkan menyusun Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD, Rancangan RKPD Kota/Kabupaten, serta melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

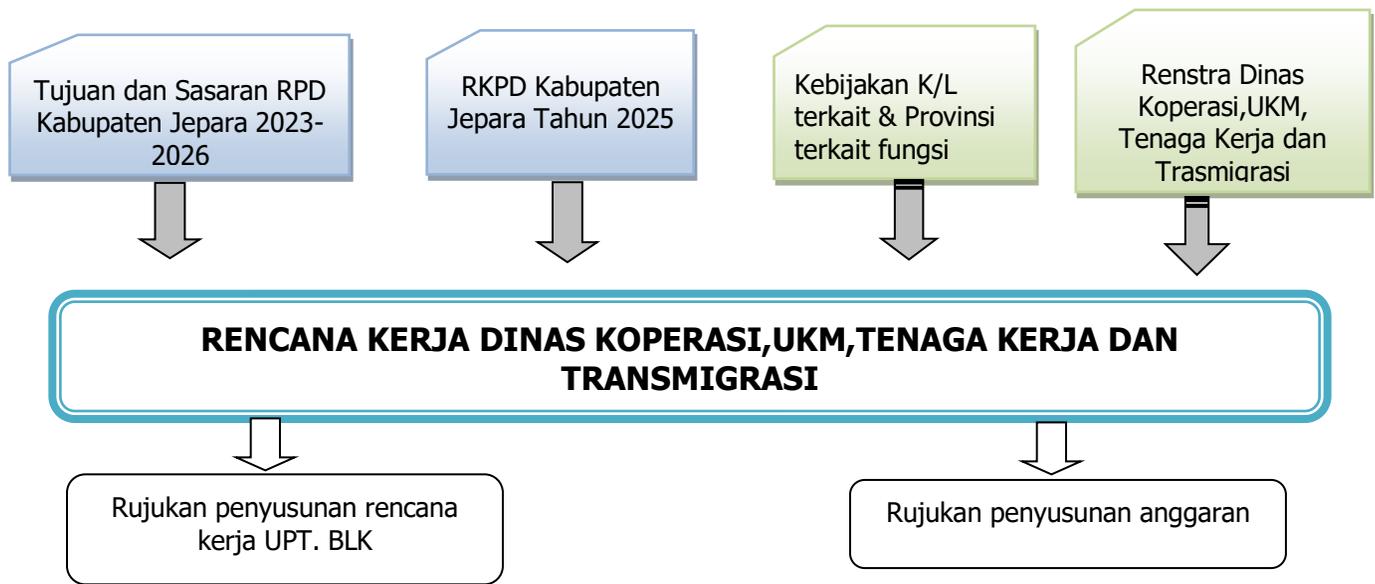
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra OPD dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja mengikuti alur: (i) persiapan penyusunan; (ii) Penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) Pelaksanaan Forum OPD atau Lintas OPD; (v) Perumusan rancangan akhir; (vi) Penetapan Renja. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Maret. Rancangan Renja disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten untuk diverifikasi disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret selaras dengan rancangan awal RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja, berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah, kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA. Proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, Dinas

Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mengampu urusan koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi. Oleh karena itu wajib menyusun Rencana Kerja yang sinergis dengan RKPD tahun 2025.

Hubungan Renja dengan dokumen lainnya sebagai berikut:



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Berebes-Tegal-Pemalang;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
31. Peraturan Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
32. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ;
33. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 -2026;
34. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 050/246/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di urusan koperasi, ukm, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

#### 2. Tujuan

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Jepara tahun 2025;
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
- c. Bahan evaluasi kinerja Dinas Koperasi , UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya, landasan hukum dan maksud serta tujuan penyusunan Renja.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU**

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; (2) Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi uraian tentang Program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari usulan program/kegiatan pada tahun 2024 (3) program dan kegiatan, yang disertai penjelasan tentang (a) Faktor-faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; (b) garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: (i) Jumlah program dan jumlah kegiatan. (ii) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan; (iii) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; (c) Penjelasan penyesuaian jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB V. PENUTUP**

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2024

Berdasarkan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mendukung pencapaian tujuan ke-3 yaitu **Mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh**, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah dengan **1) tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate**, 2)berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif, 3) menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing, dan 4) **Meningkatnya pendapatan masyarakat.**

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tahun 2023 melaksanakan 11 program yang terdiri dari 24 kegiatan dan 51 sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tercantum dalam tabel dibawah ini.

**Tabel II.1**  
**CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOPERASI**  
**TAHUN 2022 DAN 2023**

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2022)	TH.N-2 (2023)	
			Target	Realisasi
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	-	<b>38,00 %</b>	<b>30,80 %</b>
1.	Kegiatan 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	55 koperasi	55 koperasi
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	-	<b>76,00 %</b>	<b>78,70 %</b>
2.	Kegiatan 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	75 koperasi	70 koperasi
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	-	<b>4,60 %</b>	<b>7,61 %</b>
3.	Kegiatan 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	150 orang	123 orang
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	-	<b>25,00 %</b>	<b>23,42 %</b>
4.	Kegiatan 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	-	35 koperasi	59 koperasi

	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel II.1, Bidang Koperasi melaksanakan 4 program dengan 4 kegiatan. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks RPD 2023- 2026 program dan kegiatan tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran daerah “Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan foodestate”. Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing kelembagaan dan produk koperasi Kabupaten Jepara . Pada tahap Rencana Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2025, program dan kegiatan ini mendukung tema pembangunan “Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh” yang diprioritaskan pada:

- a. **Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi;**
- b. **Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam**
- c. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal
- d. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital
- e. Meningkatkan nilai investasi
- f. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- g. Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan
- h. **Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri**

Program dan kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota; Persentase Koperasi Sehat; Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas; dan Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara telah mencapai tolok ukur keberhasilan yaitu Jumlah pemuktahiran data koperasi sejumlah 55 koperasi (100 % dari target), Persentase Koperasi sehat sebesar 78,70 persen (103,55 % dari target), Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas sebesar 7,61 persen ( 165,43 % dari target) .

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dengan memaksimalkan SDM yang dimiliki oleh Bidang Koperasi baik PNS, PPKL Koperasi maupun petugas pendamping DAK untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, adanya koordinasi lintas sektoral yang harmonis yaitu dengan DPMPTSP Kabupaten Jepara dan Polres Jepara, Koperasi memberikan laporan berkala secara mandiri, beberapa koperasi menyelenggarakan pelatihan perkoperasian secara mandiri, Koperasi dari unsur internal (Kopkar, KPRI) masih menerapkan prinsip-prinsip koperasi.

Beberapa target kinerja program yang belum dapat tercapai yaitu Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 30,80 persen (81,05 % dari target); dan Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri sebesar 23,42 persen ( 93,67 % dari target).

Faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut adalah: pembubaran koperasi memerlukan proses yang lama dan harus ada SK pembubaran dari Kemenkopukm RI sehingga data koperasi masih aktif tetapi riil koperasi tersebut sudah tidak beroperasi, kepatuhan regulasi perkoperasian rendah dan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan.

**Tabel II.2**

**CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG USAHA KECIL MENENGAH  
TAHUN 2022 DAN 2023**

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2022)	TH.N-2 (2023)	
			Target	Realisasi
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	-	<b>0,52 %</b>	<b>0,55 %</b>
1.	Kegiatan 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	-	300 unit usaha	450 unit usaha

	dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	-	<b>1,76 %</b>	<b>2,00 %</b>
2.	Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	573 unit usaha	573 unit usaha

Berdasarkan Tabel II.2, Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) melaksanakan 2 program dengan 2 kegiatan. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. **Program Pengembangan UMKM** dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil .

Dalam konteks RPD 2023- 2026 program dan kegiatan tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran daerah “Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan foodestate”. Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing kelembagaan dan produk koperasi Kabupaten Jepara. Pada tahap Rencana Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2025, program dan kegiatan ini mendukung tema pembangunan “Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh” yang diprioritaskan pada:

- a. **Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi;**
- b. **Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam**
- c. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal
- d. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital
- e. Meningkatkan nilai investasi
- f. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- g. Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan
- h. **Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri**

Program dan kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran; dan Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara telah mencapai tolok ukur keberhasilan yaitu Persentase unit usaha yang teridentifikasi

potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran sebesar 0,55 persen ( 105,77 % dari target), Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri sebesar 2,00 persen ( 113,64 % dari target).

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Adanya hubungan yang harmonis lintas sektoral dengan DPMPTSP Kabupaten Jepara, LPPM UNISNU, LP-POM MUI dan toko retail modern, dan perizinan usaha bersifat fleksibel sehingga bisa langsung dijalankan.

Namun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan yaitu kurangnya inovasi pelaku usaha dalam mengembangkan produk usahanya, pelaku usaha kurang memahami tentang IPTEK sehingga pemasaran produknya terbatas dan terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

**Tabel II.3**  
**CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG TENAGA KERJA DAN**  
**TRANSMIGRASI**  
**TAHUN 2022 DAN 2023**

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2022)	TH.N-2 (2023)	
			Target	Realisasi
	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>2,70%</b>	<b>4,11 %</b>
1.	Kegiatan 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-	528 orang	528 orang
2	Kegiatan 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	15 lembaga	15 lembaga
3	Kegiatan 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	15 perizinan	11 perizinan
4	Kegiatan 4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan	-	2 perusahaan	2 perusahaan
5	Kegiatan 5. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		5 dokumen	5 dokumen
	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	-	<b>8,28%</b>	<b>8,64 %</b>

5.	Kegiatan 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	-	7.200 orang	9.967 orang
6.	Kegiatan 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	20.000 orang	17.504 orang
7.	Kegiatan 3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	380 orang	380 orang
8.	Kegiatan 4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 orang	274 orang
	<b>Program Hubungan Industrial</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
9.	Kegiatan 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	45 perusahaan	45 perusahaan
10.	Kegiatan 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	35 perkara	97 perkara
	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>
11.	Kegiatan 1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	2 KK	0 KK

Berdasarkan Tabel II.3, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 3 program dengan 11 kegiatan. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (i), Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (ii), Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (iii), dan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan (iv) dan (v) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. **Penempatan Tenaga**

**Kerja** dengan kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota (i), Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (ii), Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota (iii), dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (iv). **Program Hubungan Industrial** dengan kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (i) dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota (ii). **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (i).

Dalam konteks RPD 2023-2026 program dan kegiatan tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran daerah “Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan foodestate”. Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing kelembagaan dan produk koperasi Kabupaten Jepara. Pada tahap Rencana Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2025, program dan kegiatan ini mendukung tema pembangunan “Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh” yang diprioritaskan pada:

- i. **Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi;**
- j. **Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam**
- k. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal
- l. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital
- m. Meningkatkan nilai investasi
- n. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- o. Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan
- p. **Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri**

Program dan kegiatan ini untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pencari Kerja yang dilatih, Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan, Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit dan Rasio peningkatan jumlah transmigran.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencapai tolok ukur keberhasilan yaitu Persentase Pencari Kerja yang dilatih sebesar 4,11 % (152,22 % dari target), Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 528 orang (100% dari target), Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

sebanyak 15 lembaga (100 % dari target), Jumlah sumber daya perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi sebanyak 15 perizinan (100 % dari target), Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah sebanyak 5 dokumen (100 % dari target), ), persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 8,64 % ( 104,35 % dari target), Jumlah penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme pelayanan Antar kerja baik AKL, AKAD dan perluasan kesempatan kerja sebanyak 9.967 orang (138,43 % dari target), Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan sebanyak 380 orang (100 % dari target), Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja sebanyak 274 orang (274 % dari target), Persentase penyelesaian PHI/PHK melalui tripartit sebesar 100 % (100 % dari target), Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) sebesar 45 perusahaan (100 % dari target), Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan sebanyak 97 perkara (277,14 dari target).

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Adanya tambahan alokasi anggaran DBHCHT sehingga bisa menambahkan jumlah peserta pelatihan, segera menindaklanjuti masalah hubungan industrial yang disampaikan ke dinas, dan ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditentukan.

Namun demikian terdapat beberapa target kinerja program kegiatan yang belum dapat tercapai adalah jumlah sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi sebanyak 11 perizinan ( 73,33 % dari target), jumlah pencari dan pemberi kerja yang dilayani melalui system online sebanyak 17.504 orang (59,00 % dari target), , Rasio peningkatan jumlah transmigran sebesar 0 % ( 0 % dari target) dan Jumlah KK yang berangkat transmigrasi sebanyak 0 KK (0% dari target)

Faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut yaitu: Beberapa LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) dan BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas) mengalami permasalahan terkait dokumen akta pendirian dan NPWP sehingga banyak yang mengajukan belum sampai tahap akhir, Pencari kerja terdaftar yang kita layani adalah mereka yang membutuhkan bantuan mencari pekerjaan baik sektor formal maupun informal dan membutuhkan pelatihan, Tidak semua pencari kerja mengajukan permohonan AK I ketika mereka dapat mengakses lowongan dan mendapat pekerjaan secara mandiri, rendahnya minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi dan adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan.

**Tabel II.4**  
**CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN SEKRETARIAT**  
**TAHUN 2022 DAN 2023**

NO	JENIS KEGIATAN	TH. N-3 (2022)	TH.N-2 (2023)	
			Target	Realisasi
			-	100 %
	Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	<b>7 dokumen</b>	<b>7 dokumen</b>
	Kegiatan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	<b>14 dokumen</b>	<b>14 dokumen</b>
	Kegiatan 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	<b>1 dokumen</b>	<b>0 dokumen</b>
	Kegiatan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	<b>6 dokumen</b>	<b>6 dokumen</b>
	Kegiatan 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-	-
	Kegiatan 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	<b>24 laporan</b>	<b>24 laporan</b>
	Kegiatan 7. Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	<b>125 unit</b>	<b>125 unit</b>

Berdasarkan Tabel II.4, Bagian Sekretariat melaksanakan 1 (satu) program dengan 7 kegiatan. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota** dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (i), Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (ii), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (iii), Administrasi Umum Perangkat Daerah (iv), Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (v), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (vi), Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (vii).

Dalam konteks RPD 2023- 2026 program dan kegiatan tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”. Program dan kegiatan ini sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

### **2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, serta 6 (enam) kegiatan dengan realisasi tingkat capaian dibawah 100 % yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

### **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Terdapat 2 (dua) program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Hubungan Industrial dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta 12 (dua belas) kegiatan dengan realisasi tingkat capaian 100 %.

### **2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Terdapat 6 (enam) program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM dan 6 (enam) kegiatan dengan realisasi tingkat capaian diatas 100 %.

### **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja/program**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman kelompok usaha mikro kecil yang mempunyai usaha sejenis untuk berkembang dan bergabung menjadi badan hukum koperasi;
- b. Adanya peralihan data manual ke Online Data System (ODS) yang menyebabkan penurunan data koperasi aktif;

- c. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan pekerjajanya dalam BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Terbatasnya kuota transmigran;
- e. Rendahnya minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terpenuhinya atau melebihi target kinerja antara lain:

- a. Adanya hubungan yang harmonis lintas sektoral dengan DPMPTSP Kabupaten Jepara, LPPM UNISNU, LP-POM MUI dan toko retail modern;
- b. Perizinan usaha bersifat fleksibel sehingga bisa langsung dijalankan;
- c. Adanya koordinasi lintas sektoral yang harmonis yaitu dengan DPMPTSP Kabupaten Jepara dan Polres Jepara;
- d. Adanya ketepatan waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditentukan;
- e. Pekerja bisa menerima PHK yang dijatuhkan oleh perusahaan dan tercapainya kesepakatan antara pengusaha – pekerja terkait hak-hak pekerja yang terkena PHK;
- f. Memaksimalkan SDM yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

#### **2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD**

Dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dalam 4 (empat) tahun
- b. Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurang maksimal

#### **2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program, antara lain:

- a. Menetapkan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja;
- b. Mengusulkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja;
- c. Meningkatkan anggaran kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja;
- d. Mengusulkan tambahan anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja;

- e. Meningkatkan anggaran pelatihan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran yang ada di Kabupaten Jepara.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel II.5

**Tabel II.5**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara s/d Tahun 2023**

Nama OPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program ( Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2023-2026)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan tahun lalu(2023)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi S/D tahun berjalan	
					Target Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun (2023)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/4)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>									
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang dilatih</b>	2,83 %	-	2,7 %	4,11 %	152,22 %	2,74 %	2,74 %	96,82 %
2.07.03.201	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.192 orang	648 orang	528 orang	528 orang	100 %	472 orang	1.000 orang	45,62 %
2.07.03.201.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2.192 orang	648 orang	528 orang	528 orang	100 %	472 orang	1.000 orang	45,62 %

2.07.03.202	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	204 lembaga	-	15 lembaga	15 lembaga	100 %	9 lembaga	24 lembaga	11,76 %
2.07.03.202 .01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	204 lembaga	-	15 lembaga	15 lembaga	100 %	9 lembaga	24 lembaga	11,76 %
2.07.03.203	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	204 perizinan	-	15 perizinan	11 perizinan	100 %	12 perizinan	23 perizinan	11,27 %
2.07.03.203 .01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	204 perizinan	-	15 perizinan	11 perizinan	100 %	12 perizinan	23 perizinan	11,27 %
<b>2.07.03.204</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</b>	<b>16 perusahaan</b>		<b>2 perusahaan</b>	<b>2 perusahaan</b>	<b>100 %</b>	<b>1 perusahaan</b>	<b>3 perusahaan</b>	<b>18,75 %</b>
2.07.03.204 .01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	16 perusahaan	-	2 perusahaan	2 perusahaan	100 %	1 perusahaan	3 perusahaan	18,75 %
<b>2.07.03.205</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>20 dokumen</b>		<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>25,00 %</b>
2.07.03.205 .01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	20 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100 %	0	5 dokumen	25,00 %
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan</b>	<b>8,51 %</b>		<b>8,28 %</b>	<b>8,64 %</b>	<b>104,35 %</b>	<b>8,29 %</b>	<b>8,29 %</b>	<b>97,41 %</b>

<b>2.07.04.201</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan Kesempatan kerja</b>	<b>31.400 orang</b>	-	<b>7.200 orang</b>	<b>9.967 orang</b>	<b>138,43 %</b>	<b>4.000 orang</b>	<b>13.967 orang</b>	<b>44,48 %</b>
2.07.04.201.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	320 orang	-	60 orang	60 orang	100,00 %	60 orang	120 orang	37,5 %
2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	30.000 orang	-	7.200 orang	9.967 orang	138,43 %	4.000 orang	13.967 orang	46,56 %
2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	800 orang	-	120 orang	120 orang	100,00 %	120 orang	240 orang	30 %
2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	40 orang	-	10 orang	10 orang	100,00 %	10 orang	20 orang	50 %
2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	240 orang	-	20 orang	20 orang	100,00 %	80 orang	100 orang	41,67 %
<b>2.07.04.203</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)</b>	<b>80.000 orang</b>		<b>20.000 orang</b>	<b>17.504 orang</b>	<b>87,52 %</b>	<b>20.000 orang</b>	<b>37.504 orang</b>	<b>46,88 %</b>
2.07.04.203.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi	80.000 dokumen	-	0	0		0	0	0 %

		Informasi Pasar Kerja Online								
2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	80.000 orang	17.094 orang	20.000 orang	17.504 orang	87,52 %	20.000 orang	37.504 orang	46,88 %
2.07.04.203.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	30.000 orang	-	0	0		1.000 orang	1.000 orang	3,33 %
<b>2.07.04.204</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan</b>	<b>920 orang</b>		<b>380 orang</b>	<b>380 orang</b>	<b>100,00 %</b>	<b>380 orang</b>	<b>760 orang</b>	82,61 %
2.07.04.204.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	480 orang		200	200	100,00	200 orang	400 orang	83,33 %
2.07.04.204.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	360 orang		160	160	100,00	160 orang	320 orang	88,89 %
2.07.04.204.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	80 orang	20 orang	20	20	100,00 %	20 orang	40 orang	50 %
<b>2.07.04.205</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	376 orang	215 orang	100	172	172,00 %	0	172 orang	45,74 %
2.07.04.205.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang divalidasi pengesahan RPTKA Perpanjangan dengan lokasi kerja Kabupaten Jepara	376 orang	215 orang	100	172	172,00 %	0	172 orang	45,76

2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>2.07.05.201</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)</b>	<b>237 perusahaan</b>		<b>45 perusahaan</b>	<b>35 perusahaan</b>	<b>77,78 %</b>	<b>25 perusahaan</b>	<b>60 perusahaan</b>	<b>25,32 %</b>
2.07.05.201.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online	235 perusahaan	30 perusahaan	20 perusahaan	35 perusahaan	175 %	0	35	14,89 %
2.07.05.201.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yg menyusun PKB	24 perusahaan	40 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	100 %	0	3 laporan	12,5 %
2.07.05.201.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jml Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yg terdaftar sbgai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	555 laporan	-	60 laporan	60 laporan	100 %	25 laporan	85 laporan	15,32 %
<b>2.07.05.202</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan</b>	<b>179 perkara</b>		<b>35 perkara</b>	<b>97 perkara</b>	<b>277,14 %</b>	<b>20</b>	<b>107 perkara</b>	<b>59,78 %</b>
2.07.05.202.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Jumlah Perselisihan yang dicegah	85 perkara	122 kasus	13 perkara	13 perkara	100 %	0	13 perkara	15,29 %

	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.07.05.2020.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yg terselesaikan	179 perkara	122 kasus	20 perkara	20 perkara	100 %	20	40 perkara	22,35 %
2.07.05.2020.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg diverifikasi	224 Asosiasi dan SP/SB		3 Asosiasi dan SP/SB	3 Asosiasi dan SP/SB	100 %	20 Asosiasi dan SP/SB	23 Asosiasi dan SP/SB	10,27 %
2.07.05.2020.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	8 lembaga		2 lembaga	2 lembaga	100 %	1 lembaga	3 lembaga	37,5 %
2.07.05.2020.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.300 orang		50 orang	50 orang	100 %	0	50 orang	3,85 %
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>2.17.01.201</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun</b>	<b>28 dokumen</b>		<b>7 dokumen</b>	<b>7 dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>7 dokumen</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>50 %</b>
2.17.01.2010.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	37,5 %

2.17.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50 %
2.17.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50 %
2.17.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50 %
2.17.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50 %
2.17.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50 %
2.17.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	2 laporan	33,33 %
<b>2.17.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun</b>	<b>56 dokumen</b>		<b>14 dokumen</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>28 dokumen</b>	<b>50 %</b>
2.17.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang/bulan	54 orang/bulan	54 orang/bulan	54 orang/bulan	100 %	54 orang/bulan	54 orang/bulan	100 %
2.17.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50 %

<b>2.17.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun</b>	<b>32 dokumen</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>0 %</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>12,5 %</b>
2.17.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang		1 orang	0 orang	0 %	3 orang	4 orang	12,5 %
<b>2.17.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	24 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	12 dokumen	50 %
2.17.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	2 paket	50 %
2.17.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	2 paket	50 %
2.17.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	2 paket	50 %
2.17.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	2 paket	50 %
2.17.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	2 paket	50 %
2.17.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100 %	20 laporan	40 laporan	33,33 %
<b>2.17.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8 unit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 unit</b>	<b>0 %</b>
2.17.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket		0	0	0	0	0 unit	0 %

2.17.01.207 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit		0	0	0	0	0 unit	0 %
2.17.01.207 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		0	0	0	0	0 unit	0 %
<b>2.17.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	96 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100 %	24 laporan	48 laporan	50 %
2.17.01.208 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	24 laporan	50 %
2.17.01.208 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	24 laporan	50 %
<b>2.17.01.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	127 unit	125 unit	127 unit	127 unit	100 %	125 unit	125 unit	98,43 %
2.17.01.209 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100 %	25 unit	25 unit	100 %
2.17.01.209 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 %	0	0 unit	0 %
2.17.01.209 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 %	100 unit	100 unit	100 %

		Dipelihara/direhabilitasi								
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>50 %</b>		<b>38 %</b>	<b>30,80 %</b>	<b>81,05 %</b>	42 %	42 %	84 %
<b>2.17.03.201</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pemuktahiran data koperasi</b>	<b>301 unit usaha</b>		<b>55 unit usaha</b>	<b>55 unit usaha</b>	<b>100 %</b>	<b>65 unit usaha</b>	<b>120 unit usaha</b>	<b>39,86 %</b>
2.17.03.201.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	301 unit usaha		55 unit usaha	55 unit usaha	100 %	0	55 unit usaha	18,27 %
2.17.03.201.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	246 unit usaha	-				65 unit usaha	65 unit usaha	26,42 %
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Sehat</b>	<b>82 %</b>		<b>76 %</b>	<b>78,70 %</b>	<b>103,55 %</b>	<b>78</b>	<b>78 %</b>	<b>95,12 %</b>
<b>2.17.04.201</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>	<b>233 unit usaha</b>		75 unit usaha	70 unit usaha	93,33 %	15 unit usaha	85 unit usaha	<b>36,48 %</b>

<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas</b>	<b>7,7 %</b>		<b>4,60 %</b>	<b>7,61 %</b>	<b>165,43 %</b>	<b>6,20 %</b>	<b>6,20 %</b>	<b>80,52 %</b>
<b>2.17.05.201</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi</b>	<b>825 orang</b>		<b>150 orang</b>	<b>123 orang</b>	<b>82,00 %</b>	<b>115</b>	<b>238 orang</b>	<b>28,85 %</b>
2.17.05.201.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	825 orang	145 orang	150 orang	123 orang	82,00 %	115	238 orang	28,85 %
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>	<b>32 %</b>		<b>25 %</b>	<b>23,42 %</b>	<b>93,68 %</b>	<b>28 %</b>	<b>28 %</b>	<b>87,5 %</b>
<b>2.17.06.201</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>	<b>769 unit usaha</b>		<b>35 unit usaha</b>	<b>59 unit usaha</b>	<b>168,57 %</b>	<b>40 unit usaha</b>	<b>99 unit usaha</b>	<b>12,87 %</b>
2.17.06.201.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	769 unit usaha		35 unit usaha	59 unit usaha	168,57 %	0	59 unit usaha	7,67 %
2.17.06.201.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	710	-				40 unit usaha	40 unit usaha	5,63 %
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA</b>	<b>Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan</b>	<b>0,82 %</b>		<b>0,52 %</b>	<b>0,55 %</b>	<b>105,77 %</b>	<b>0,62 %</b>	<b>0,62 %</b>	<b>75,61 %</b>

	<b>KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>mandiri pembiayaan dan pemasaran</b>								
<b>2.17.07.201</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran</b>	<b>961 unit usaha</b>		<b>300 unit usaha</b>	<b>300 unit usaha</b>	<b>100,00 %</b>	<b>35 unit usaha</b>	<b>335 unit usaha</b>	<b>34,86 %</b>
2.17.07.201.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	330 unit usaha	-	30 unit usaha	30 unit usaha	100 %	30 unit usaha	60 unit usaha	18,19 %
2.17.07.201.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	300 unit usaha	-	9 unit usaha	9 unit usaha	100 %	5 unit usaha	14 unit usaha	4,67 %
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri</b>	<b>2,06 %</b>		<b>1,76 %</b>	<b>2,00 %</b>	<b>113,64 %</b>	<b>1,86 %</b>	<b>2,00 %</b>	<b>97,09 %</b>
<b>2.17.08.201</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Usaha mikro yang naik kelas</b>	<b>2.538 UKM</b>		<b>573 unit usaha</b>	<b>573 unit usaha</b>	<b>100 %</b>	<b>305 unit usaha</b>	<b>878 unit usaha</b>	<b>34,59 %</b>
2.17.08.201.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	2.538 Unit usaha	1.140 orang	573 unit usaha	573 unit usaha	100 %	305 unit usaha	878 unit usaha	34,59 %
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
3.32	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>									
3.32.03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Rasio peningkatan jumlah transmigran</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
3.32.03.201	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KK yang berangkat</b>	<b>14 KK</b>	<b>1 KK</b>	<b>2 KK</b>	<b>0 KK</b>	<b>0 %</b>	<b>2 KK</b>	<b>2 KK</b>	<b>14,29 %</b>

3.32.03.201 .09	Penjajagan ke calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah calon lokasi penempatan Tranmigrasi yng dilaksanakan penjajagan	4 lokasi		1 lokasi	0 lokasi	0 %	0	0	0 %
3.32.03.201 .15	Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang ditampung di penampungan kabupatenDaerah asal	14 KK	1 KK	0 KK	0 KK	0 %	2 KK	2 KK	14,29 %
3.32.03.201 .19	Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan kabupaten/kota sampai ke lokasi	14 KK	1 KK	2 KK	0 KK	0 %	2 KK	2 KK	14,29 %

Berdasarkan evaluasi renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2023, teridentifikasi bahwa realisasi target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu:

- a. Bidang Koperasi dengan Capaian kinerja: (i) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 81,05 %; (ii) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 103,55 %; (iii) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 165,43 % dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 93,68 %;
- b. Bidang Usaha Kecil Menengah dengan capaian kinerja: (i) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 105,77 % dan Program Pengembangan UMKM sebesar 113,64 %.
- c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai kinerja: (i) Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja sebesar 152,22 %; (ii) Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 104,35 %; dan (iii) Program Hubungan Industrial sebesar 100 %, dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar 0 %.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPD 2023-2026 dan Renstra 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel II.6. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Uraian	Keterangan
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	IKU
2	Persentase Wirausaha	IKU
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	IKK
4	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	IKK
5	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	IKK
6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	IKK

7	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	IKK
8	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	IKK
9	Persentase UKM yang berdaya saing	IKK
10	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	IKK

**TABEL II.7**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja		IKK	%	70,10	70,30	70,60	71,00	71,57	70,30	70,60	71,00	Melebihi target
2	Persentase tenaga kerja yang siap kerja		IKK	%	2,02	2,04	2,07	2,09	1,85	2,04	3,20	3,70	Belum sesuai target
3	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri		IKK	%	3,40	3,50	3,60	3,70	4,11	2,90	3,60	3,70	Melebihi target
4	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan		IKK	%	65,00	67,00	70,00	73,00	82,66	67,00	70,00	73,00	Melebihi target
5	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan		IKK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai target
6	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran		IKK	%	0,52	0,62	0,72	0,82	0,56	0,62	0,72	0,82	Melebihi target
7	Persentase UKM yang berdaya saing		IKK	%	3,51	3,61	3,71	3,81	3,60	3,61	3,71	3,81	Melebihi target
8	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri		IKK	%	1,76	1,86	1,96	2,06	2,00	1,86	1,96	2,06	Melebihi target

Dari tabel II.7 tersebut di atas, Indikator kinerja yang sesuai dan melebihi target yaitu: Tingkat partisipasi angkatan kerja, Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri, Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan, Persentase UKM yang berdaya saing dan Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator tersebut yaitu: Adanya kemudahan pendaftaran usaha melalui OSS, keberhasilan Mediator HI yang mendorong penyelesaian secara bipartit, Klarifikasi dan pemantau setiap kasus perselisihan yang masuk, dan adanya alokasi anggaran DBHCHT untuk pelatihan berbasis kompetensi, dan Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Sementara indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah:, Persentase tenaga kerja yang siap kerja. Faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut yaitu: pasar kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, dan jumlah pencari kerja yang mendaftarkan / membuat AK-1 jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan penduduk usia kerja.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya dalam urusan koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, berdasar tugas dan fungsi tersebut, maka isu-isu penting yang diidentifikasi sebagai berikut.

**Tabel II.8.**  
**Identifikasi Isu Penting Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025**

Aspek dari Fungsi Penyelenggaraan urusan OPD yang harus dipenuhi	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan (target)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan/Isu-isu pelayanan SKPD
			Internal (kekuatan & kelemahan)	Eksternal (peluang dan tantangan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fungsi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi bidang koperasi	- Persentase Koperasi Aktif (45,17 %)	Sesuai renstra seharusnya : - 45 %	<b>Kekuatan :</b> - Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	<b>Peluang :</b> - Perkembangan teknologi informasi (TI) menghadirkan inovasi dalam	- Masih rendahnya capaian Koperasi Sehat

Aspek dari Fungsi Penyelenggaraan urusan OPD yang harus dipenuhi	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan (target)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan/Isu pelayanan SKPD
			Internal (kekuatan & kelemahan)	Eksternal (peluang dan tantangan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>- Adanya peluang sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Urusan Koperasi UKM Setda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi UKM, Jawa Tengah), Kementerian Koperasi UKM RI</p> <p>- Harmonisasi hubungan antar Bidang dan Seksi dalam Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p><b>Kelemahan :</b></p> <p>- Kurang SDM Pengawas Koperasi</p> <p>- SDM yang berkompeten terbatas</p> <p>-Belum adanya kebijakan atau peraturan daerah Kabupaten Jepara yang mengatur tentang izin pendirian cabang koperasi dari daerah lain sehingga menimbulkan persaingan dengan koperasi yang ada di Kabupaten Jepara</p>	<p>berusaha dan memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM</p> <p><b>Tantangan :</b></p> <p>- Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas</p> <p>- Dengan bonus demografi anak muda yang sangat banyak, ketertarikan anak muda untuk turut memajukan koperasi masih sangat rendah</p> <p>- Masih terbatasnya akses informasi KUMKM terhadap permodalan dan sumber-sumber pembiayaan</p>	
Fungsi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan,	- Persentase UMKM	Sesuai renstra seharusnya	<b>Kekuatan :</b> - Ketepatan pelaksanaan	<b>Peluang :</b> - Perkembangan	- Belum Optimalnya Pertumbuhannya

Aspek dari Fungsi Penyelenggaraan urusan OPD yang harus dipenuhi	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan (target)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan/Isu pelayanan SKPD
			Internal (kekuatan & kelemahan)	Eksternal (peluang dan tantangan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang pemasaran dan jaringan usaha serta perlindungan dan pendampingan usaha</p>	<p>yang mandiri pembiayaan dan pemasaran (0,56 %) - Persentase UKM yang berdaya saing (3,60 %) - Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri (2,00 %)</p>	<p>- 0,52 % - 3,51 % - 1,76 %</p>	<p>n kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan - Harmonisasi hubungan antar Bidang dan Seksi dalam Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Adanya peluang sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro Urusan Koperasi UKM Setda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi UKM, Jawa Tengah), Kementerian Koperasi UKM RI</p> <p><b>Kelemahan :</b></p> <p>- Kurangnya SDM di bidang UKM</p>	<p>gan teknologi informasi (TI) menghadirkan inovasi dalam berusaha dan memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM - Potensi Pariwisata yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru</p> <p><b>Tantangan :</b></p> <p>- Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha - Masih terbatasnya akses informasi KUMKM terhadap permodalan dan sumber-sumber pembiayaan - Kurangnya inovasi produk UMKM - Rendahnya daya saing UMKM</p>	<p>Usaha Mikro yang berkualitas</p>
<p>Fungsi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian,</p>	<p>- Tingkat partisipasi angkatan kerja (71,57 %)</p>	<p>Sesuai renstra seharusnya : - 70,10 %</p>	<p><b>Kekuatan :</b></p> <p>- Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai</p>	<p><b>Peluang :</b></p> <p>- Potensi Pariwisata yang semakin dapat</p>	<p>- Penempatan tenaga kerja belum sesuai dengan pendidikan dan kompetensi</p>

Aspek dari Fungsi Penyelenggaraan urusan OPD yang harus dipenuhi	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan (target)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan/Isu pelayanan SKPD
			Internal (kekuatan & kelemahan)	Eksternal (peluang dan tantangan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi di bidang penempatan, perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja serta transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase tenaga kerja yang siap kerja (1,85 %)</li> <li>- Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri (4,11 %)</li> <li>- Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (82,66 %)</li> <li>- Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan (100 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,02 %</li> <li>- 3,4%</li> <li>- 65 %</li> <li>- 100 %</li> </ul>	<p>dengan jadwal yang telah ditentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya tambahan SDM melalui pengadaan CPNS 2022</li> <li>- Harmonisasi hubungan antar Bidang dan Seksi dalam Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul> <p><b>Kelemahan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya staf di seksi transmigrasi</li> <li>- Belum adanya diklat bagi calon mediator sehingga SDM yang ada belum bisa melakukan mediasi masalah hubungan industrial</li> </ul>	<p>diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjaminnya tenaga kerja melalui jaminan kesehatan dan jamsostek</li> <li>- Terbinanya para masyarakat yang mengganggu melalui beberapa jenis pelatihan</li> <li>- Masih adanya peluang untuk penajagan penempatan calon transmigran ke Sulawesi dan NTT maupun Maluku, selain Sumatera dan Kalimantan</li> </ul> <p><b>Tantangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi dan kualitas Pencari Kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja/persyaratan kerja yang tersedia;</li> <li>- Masih banyaknya pengangguran yang belum tertampung di dunia kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang berfungsinya Sarana-sarana HI dan Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja</li> <li>- Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut transmigrasi</li> </ul>

Aspek dari Fungsi Penyelenggaraan urusan OPD yang harus dipenuhi	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan (target)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan/Isu pelayanan SKPD
			Internal (kekuatan & kelemahan)	Eksternal (peluang dan tantangan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat buruh akan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan industrial</li> <li>- Masih adanya kasus PHK di perusahaan</li> <li>- Rendahnya minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi</li> </ul>	

Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari aspek/ sub urusan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencapai kinerja 100% atau lebih (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Besaran Tenaga Kerja yang Membuka Usaha Mandiri, Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan, Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran, Persentase UKM yang berdaya saing, dan Persentase UMKM yang berkembang kearah mandiri) namun demikian masih memerlukan peningkatan dalam pelayanan yaitu persentase koperasi aktif, Persentase tenaga kerja yang siap kerja, dan Jumlah transmigran umum. Kekurangan ini terkait dengan beberapa faktor, antara lain : rendahnya minat masyarakat untuk ikut program transmigrasi, peralihan data manual ke Online Data System (ODS) yang menyebabkan penurunan data koperasi aktif.

Sementara itu, dilihat dari evaluasi kontribusi Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan transmigrasi terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, atau tujuan dan sasaran daerah, atau terhadap capaian program nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel II.9.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Terhadap Pencapaian Tujuan-Sasaran, Prioritas Daerah**

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026				
NO	Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD terkait pencapaian NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan 3 Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh	Dari capaian indikator pendukung misi 3, capaian renja belum memenuhi target SDGs tujuan 8 dan tujuan 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya masalah hubungan industrial</li> <li>- Kurangnya kompetensi pencari kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin bertambahnya kesadaran pengusaha-pekerja akan hak dan kewajibannya</li> <li>- Meningkatnya jumlah dan jenis pelatihan bagi pencari kerja</li> <li>- Masih banyaknya perusahaan yang membuka usaha di Kabupaten Jepara sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang ada.</li> </ul>
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	Program Penempatan Tenaga Kerja			
	Program Hubungan Industrial			

Berdasar identifikasi di atas, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025 adalah:

**Tabel II.10.**  
**Pemetaan Isu-isu Penting Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara**  
**berdasar Indikator Sasaran**

Capaian Indikator Sasaran yang belum tercapai/ yang harus dikejar/harus dipertahankan tingkat capaiannya	Isu Penting Pelayanan	Rencana Tindak yang Dibutuhkan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
(1)	(2)	(3)
<b>Isu Pelayanan Sub Urusan Koperasi dan UMKM</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase koperasi aktif</li> <li>- Persentase unit usaha yang berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya persentase koperasi aktif</li> <li>- Masih rendahnya persentase unit usaha yang berdaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengurus dan anggota koperasi melalui pendidikan dan latihan perkoperasian</li> <li>- Pengawasan, penilaian kesehatan dan pemberdayaan koperasi</li> <li>- Meningkatkan kompetensi pelaku usaha</li> <li>- Pembinaan dan pemberdayaan terhadap UMKM</li> </ul>
<b>Isu Pelayanan Sub Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase tenaga kerja siap kerja</li> <li>- Tingkat Partisipasi angkatan Kerja</li> <li>- persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)</li> <li>- Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan tenaga kerja belum sesuai dengan pendidikan dan kompetensi</li> <li>- Kurang berfungsinya Sarana-sarana HI dan Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja</li> <li>- Rendahnya minat masyarakat ikut program transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan</li> <li>- Penyediaan layanan pasar kerja sebagai fasilitasi link and match antara penawaran dan permintaan tenaga kerja</li> <li>- Membentuk dan mengoptimalkan sarana Hubungan Industrial</li> <li>- Sosialisasi program transmigrasi ke masyarakat</li> </ul>
<b>Isu Pelayanan sub urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya capaian kinerja PD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan monitoring program/kegiatan secara berkala</li> </ul>

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 10.138.811.000 Sedangkan menurut hasil analisis kebutuhan adalah sebesar

Rp. 9.458.146.065,- termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS. Adanya perbedaan penganggaran antara rancangan awal RKPD dan menurut hasil analisis kebutuhan di karenakan adanya penambahan maupun pengurangan anggaran pada beberapa subkegiatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Tabel II.11  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Jepara  
( terlampir)

**TABEL II.11**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025**  
**KABUPATEN JEPARA**

Nama OPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
2	07				600.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.419.834.000	
2	073		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,79 %	45.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang dilatih	2,79 %	1.369.334.000	
2	07301		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	0 orang	0	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	332 orang	1.361.834.000	
2	07301	Kab. Jepara	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	0 orang	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat	332 orang	1.361.834.000	

					<i>berdasarkan Klaster Kompetensi</i>		<i>Kompetensi pada Tahun n</i>			<i>Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>		<i>Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>			
2	0	0	2		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>	<b>15 lembaga</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>	<b>9 lembaga</b>	<b>2.500.000</b>	
2	0	0	2	0	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	<i>15 lembaga</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	<i>9 lembaga</i>	<i>2.500.000</i>	
2	0	0	2		<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>		<b>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</b>	<b>15 perizinan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>		<b>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</b>	<b>9 perizinan</b>	<b>2.500.000</b>	
2	0	0	2	0	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>15 perizinan</i>	<i>10.000.000</i>	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>9 perizinan</i>	<i>2.500.000</i>	
2	0	0	2		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</b>	<b>4 perusahaan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</b>	<b>1 perusahaan</b>	<b>2.500.000</b>	
2	0	0	2	0	<i>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	<i>4 perusahaan</i>	<i>25.000.000</i>	<i>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>	<i>1 perusahaan</i>	<i>2.500.000</i>	

2	0	0			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,31 %	305.000.000	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	8,31 %	27.500.000	
2	0	0	2		<b>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan kesempatan kerja</b>	<b>7.600 orang</b>	<b>135.000.000</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan kesempatan kerja</b>	<b>7.600 orang</b>	<b>16.000.000</b>	
2	0	0	2	0	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>	<i>60 Orang</i>	<i>25.000.000</i>	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>	<i>30 Orang</i>	<i>2.000.000</i>	
2	0	0	2	0	<i>Pelayanan antar kerja</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>	<i>7600 Orang</i>	<i>25.000.000</i>	<i>Pelayanan antar kerja</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>	<i>7400 Orang</i>	<i>2.500.000</i>	
2	0	0	2	0	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	<i>360 Orang</i>	<i>40.000.000</i>	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	<i>50 Orang</i>	<i>5.000.000</i>	

2	0	0	2	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	20.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 Orang	2.500.000	
2	0	0	2	0	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	25.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	4.000.000	
2	0	0	2	0	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)</b>	<b>20.000 orang</b>	<b>115.000.000</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)</b>	<b>20.000 orang</b>	<b>22.500.000</b>	
2	0	0	2	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Jepara	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	20.000 Orang	40.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Jepara	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	20.000 Orang	2.500.000	
2	0	0	2	0	Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1.000 Orang	75.000.000	Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Jepara	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	0 Orang	0	

2	0	0	2		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan</b>	<b>420 orang</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan</b>	<b>270 orang</b>	<b>9.000.000</b>	
2	0	0	2	0	<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>200 Orang</i>	<i>20.000.000</i>	<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	<i>50 Orang</i>	<i>2.500.000</i>	
2	0	0	2	0	<i>Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i>	<i>200 Orang</i>	<i>15.000.000</i>	<i>Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i>	<i>200 Orang</i>	<i>2.500.000</i>	
2	0	0	2	0	<i>Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	<i>20 Orang</i>	<i>20.000.000</i>	<i>Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	<i>20 Orang</i>	<i>4.000.000</i>	
2	0	0			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit</b>	<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit</b>	<b>100 %</b>	<b>23.000.000</b>	
2	0	0	2		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online</b>	<b>50 perusahaan</b>	<b>94.600.000</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jml Persh yg melaksanakan Pengesahan PP yg terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online</b>	<b>50 perusahaan</b>	<b>12.649.000</b>	

2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PP	25 perusahaan	30.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PP	25 perusahaan	2.062.000	
2	0	0	2	0	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PKB	7 perusahaan	10.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kab. Jepara	Jumlah Perusahaan yg memiliki PKB	0 perusahaan	0	
2	7	5	2	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Jepara	Jml Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yg terdaftar sbgai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 laporan	54.600.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Jepara	Jml Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yg terdaftar sbgai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 laporan	10..587.000	
2	0	0	2	0	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan</b>	<b>55 perkara</b>	<b>155.400.000</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan</b>	<b>55 perkara</b>	<b>10.351.000</b>	
2	0	0	2	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Perselisihan yang dicegah	25 perkara	39.350.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Kab. Jepara	Jumlah Perselisihan yang dicegah	25 perkara	3.584.000	



2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>8.524.811.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>7.176.080.065</b>	
2	1	0	2		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun</b>	<b>7 dokumen</b>	<b>35.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun</b>	<b>7 dokumen</b>	<b>15.000.000</b>	
2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1 Dokumen	0	

							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
2	'1 7	'0 1	2 0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0	
2	'1 7	'0 1	2 0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	
<b>2</b>	<b>'1 7</b>	<b>'0 1</b>	<b>2 0 2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>6.355.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>6.136.535.359</b>	
2	'1 7	'0 1	2 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	6.355.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	6.136.535.359	
<b>2</b>	<b>'1 7</b>	<b>'0 1</b>	<b>2 0 5</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun</b>	<b>0 dokumen</b>	<b>0</b>	

2	'1 7	'0 1	2 0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	90.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Jepara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	
<b>2</b>	<b>'1 7</b>	<b>'0 1</b>	<b>2 0 6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>312.139.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun</b>	<b>6 dokumen</b>	<b>143.200.00</b>	
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jepara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.139.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
2	'1 7	'0 1	2 0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jepara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jepara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	

2	'1 7	'0 1	2 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	85.200.000	
2	1 7	0 1	2 0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35 unit</b>	<b>338.820.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5 unit</b>	<b>18.687.800</b>	
2	'1 7	'0 1	2 0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Kab. Jepara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	45.460.000	Pengadaan Mebel	Kab. Jepara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	
2	'1 7	'0 1	2 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	244.360.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	18.687.800	
2	'1 7	'0 1	2 0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	49.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
2	1 7	0 1	2 0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun</b>	<b>24 laporan</b>	<b>650.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun</b>	<b>24 laporan</b>	<b>728.090.000</b>	
2	'1 7	'0 1	2 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	130.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	120.000.000	

												yang Disediakan			
2	'1 7	'0 1	2 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	520.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jepara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	608.090.000	
<b>2</b>	<b>'1 7</b>	<b>'0 1</b>	<b>2 0 9</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>125 unit</b>	<b>743.852.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>125 unit</b>	<b>134.566.906</b>	
2	'1 7	'0 1	2 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jepara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jepara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	64.925.800	
2	'1 7	'0 1	2 0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 Unit	605.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	0 Unit	0	
2	'1 7	'0 1	2 0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	100 Unit	73.852.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	100 Unit	69.641.106	
<b>2</b>	<b>'1 7</b>	<b>'0 3</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN</b>		<b>Persentase Koperasi yang</b>	<b>46 %</b>	<b>75.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN</b>		<b>Persentase Koperasi yang</b>	<b>46 %</b>	<b>20.000.000</b>	

					<b>PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah pemuktahiran data koperasi</b>	<b>65 unit usaha</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah pemuktahiran data koperasi</b>	<b>55 unit usaha</b>	<b>20.000.000</b>
2	1	0	2	0	<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasa</i>	<i>65 unit usaha</i>	<i>75.000.000</i>	<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasa</i>	<i>55 unit usaha</i>	<i>20.000.000</i>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		<b>Persentase Koperasi Sehat</b>	<b>80 %</b>	<b>75.000.000</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		<b>Persentase Koperasi Sehat</b>	<b>80 %</b>	<b>15.000.000</b>
2	1	0	2	0	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah Koperasi Sehat</i>	<i>50 unit usaha</i>	<i>75.000.000</i>	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)</i>		<i>Jumlah Koperasi Sehat</i>	<i>30 unit usaha</i>	<i>15.000.000</i>

										<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2	1 7	0 4	2 0 1	0 1	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	<i>50 unit usaha</i>	<i>75.000.000</i>	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	<i>30 unit usaha</i>	<i>15.000.000</i>	
<b>2</b>	<b>1 7</b>	<b>0 5</b>			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas</b>	<b>6,9 %</b>	<b>34.000.000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas</b>	<b>6,9 %</b>	<b>243.776.000</b>	
2	1 7	0 5	2 0 1		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi</b>	<b>120 orang</b>	<b>34.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi</b>	<b>120 orang</b>	<b>243.776.000</b>	
2	1 7	0 5	2 0 1	0 1	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	<i>120 orang</i>	<i>34.000.000</i>	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Kab. Jepara</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	<i>120 orang</i>	<i>243.776.000</i>	
<b>2</b>	<b>1 7</b>	<b>0 6</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>	<b>30 %</b>	<b>130.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>	<b>30 %</b>	<b>15.000.000</b>	
2	1 7	0 6	2 0 1		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>	<b>45 unit usaha</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>	<b>15 unit usaha</b>	<b>15.000.000</b>	

2	1	0	2	0	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	45 unit usaha	130.000.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	15 unit usaha	15.000.000	
2	1	0			<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>		<b>Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran</b>	<b>0,72 %</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>		<b>Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran</b>	<b>0,72 %</b>		
2	1	0	2	0	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/</b>		<b>Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran</b>	<b>165 unit usaha</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/</b>		<b>Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran</b>	<b>75 unit usaha</b>	<b>216.456.000</b>	
2	1	0	2	0	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	30 unit usaha	35.000.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	0 unit usaha	0	
2	1	0	2	0	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	14 unit usaha	65.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Jepara	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	0 unit usaha	0	
2	1	0	2	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 orang	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	Kab. Jepara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	75 orang	216.456.000	



												Dilaksanakan Penjajakan				
3	3	0	2	1	Penampungan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang ditampung di penampungan kabupaten/daerah asal	2 Kepala Keluarg a	5.000.000	Penampungan Kabupaten/Kota	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang ditampung di penampungan kabupaten/daer ah asal	2 Kepal a Kelu rga	466.000		
3	3	0	2	1	Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan kabupaten/kota sampai ke lokasi	2 Kepala Keluarg a	20.000.000	Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi	Kab. Jepara	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan kabupaten/kot a sampai ke lokasi	2 Kepal a Kelu rga	0		
					<b>JUMLAH</b>				<b>10.138.811. 000</b>					<b>9.458.146.06 5</b>		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara serta keterbatasan pagu anggaran, maka yang dilakukan proses penyaringan dan prioritasasi terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mencatat usulan-usulan yang direkap dari musrenbang yang memenuhi kriteria berdaya ungkit tinggi terhadap kualitas kabupaten dan kesejahteraan masyarakat terkait urusan kewenangan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan sub urusan: (i) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (ii) Tenaga Kerja; dan (iii) Transmigrasi.

*Kedua*, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

*Ketiga*, memilih dan memilah berdasar urutan prioritas pendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Usulan kegiatan untuk Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel II.12  
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Jepara

**Nama: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara**

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi (Desa/Dukuh/RT/RW)	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
11	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA/ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi / Sub KegiatanProses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Papasan, Kec. Bangsri, Kab. Jepara	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 orang	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM/Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil /Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Miro	Desa Karimunjawa, Kab. Jepara Ds. Gemiring Kidul, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	90 unit usaha 30 unit usaha	

Ketiga usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Tema RKP 2025 **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih berkarakter”** dengan 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Perekonomian yang berdaya saing dan berkeanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan insfrastruktur yang merata dan berkualitas dengan fokus pada :
  - a. memperkuat produksi dan produktivitas sektor unggulan, investasi,kapasitas fiskal,kondusivitas wilayah;
  - b. Meningkatkan akses ekonomi produktif, perluasan lapangan kerja, akses layanan dasar untuk penduduk miskin;
  - c. Meningkatkan rasio kemandirian fiskal;
  - d. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
  - e. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
  - f. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata dengan fokus pada:
  - a. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat yang insklusif dan merata;

- b. Meningkatkan pemerataan akses layanan Kesehatan dan penanganan stunting;
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar dan penyediaan sarpras olah raga yang memadai dan terjangkau;
  - d. Peningkatan kualitas sarana prasarana literasi dan kapasitas SDM;
  - e. Meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan, pemberdayaan pemuda;
  - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya dan pengembangan warisan budaya;
  - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender;
  - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender,serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak.
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan fokus pada:
    - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
    - b. Meningkatkan ketahanan energi;
    - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air;
    - d. Penanggulangan bencana (peningkatan kapasitas dan menurunkan kerentanan bencana).
  4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif dengan fokus pada:
    - a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif, melalui transformasi digitalisasi pemerintahan, pengembangan pola karir dan pengembangan kompetensi, penguatan pengawasan dan pengendalian;
    - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama daerah.

Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2025 adalah: “Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh”, maka belanja daerah akan lebih diarahkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang terdiri dari 8 (delapan) Prioritas, yaitu:

- 1. Pengembangan, Pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi;**
- 2. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam;**
3. Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal;

4. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital;
5. Meningkatkan nilai investasi;
6. Akselerasi pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
7. Penguatan, kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan; dan
8. **Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.**

**Tabel III.1**

**Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Kota dengan Prioritas Renja Dinas  
Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025**

<b>Prioritas Nasional/Provinsi/Kota</b>	<b>Prioritas Renja OPD 2025</b>
<b>Prioritas Nasional</b>	
Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>2. Peningkatan jejaring dan penempatan tenaga kerja</li> <li>3. Pemberayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>4. Pengembangan UMKM</li> </ol>
<b>Prioritas Provinsi</b>	
Peningkatan Kapasitas Perekonomian yang berdaya saing dan berkeanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan insfrastruktur yang merata dan berkualitas dengan fokus pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperkuat produksi dan produktivitas sektor unggulan, investasi,kapasitas fiskal,kondusivitas wilayah;</li> <li>b. Meningkatkan akses ekonomi produktif, perluasan lapangan kerja, akses layanan dasar untuk penduduk miskin;</li> <li>c. Meningkatkan rasio kemandirian fiskal;</li> <li>d. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;</li> <li>e. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;</li> <li>f. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>2. Peningkatan jejaring dan penempatan tenaga kerja</li> <li>3. Pemberayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>4. Pengembangan UMKM</li> <li>5. Peningkatan produktivitas UMKM</li> </ol>
<b>Prioritas Kabupaten</b>	
Pengembangan, Pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>2. Pengembangan UMKM</li> <li>3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha</li> <li>4. Peningkatan pemahaman dan kapasitas pengurus dan anggota koperasi</li> </ol>

Prioritas Nasional/Provinsi/Kota	Prioritas Renja OPD 2025
Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam	Peningkatan produktivitas UMKM
Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>2. Peningkatan jejaring dan penempatan tenaga kerja</li> </ol>

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

**Tabel III.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025**

Tujuan Renstra tahun 2023 s/d tahun 2026	Sasaran Renstra Tahun 2023 s/d 2026	Isu-isu Penting dan Prioritas Tahun 2025	Tujuan Renja tahun 2025	Sasaran Renja Tahun 2025	Indikator Sasaran Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Formulasi	Program
1. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana Hubungan Industrial	1. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja 2. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha 3. Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-	Penempatan tenaga kerja belum sesuai dengan pendidikan dan kompetensi Kurang berfungsinya Sarana-sarana HI dan Kurangnya kesejahteraan tenaga kerja Rendahnya minat masyarakat ikut program transmigrasi	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana Hubungan Industrial	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	%	3,20	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja dikalikan 100 %	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi 67ngkatan67n dan kompetensi yang sesuai dengan dunia 67ngkatan dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,60	Jumlah 67ngkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja dikalikan 100 %	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Tujuan Renstra tahun 2023 s/d tahun 2026	Sasaran Renstra Tahun 2023 s/d 2026	Isu-isu Penting dan Prioritas Tahun 2025	Tujuan Renja tahun 2025	Sasaran Renja Tahun 2025	Indikator Sasaran Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Formulasi	Program
	sarana HI di perusahaan 4. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi			Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	%	60,38	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikalikan 100 %	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	orang	15	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
2. Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas	5. Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP 6. Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas.	3. Masih rendahnya persentase kopersi aktif 4. Masih rendahnya persentase unit usaha yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP	Persentase koperasi aktif	%	49	Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikalikan 100 %	- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - PROGRAM PENDIDIKAN

Tujuan Renstra tahun 2023 s/d tahun 2026	Sasaran Renstra Tahun 2023 s/d 2026	Isu-isu Penting dan Prioritas Tahun 2025	Tujuan Renja tahun 2025	Sasaran Renja Tahun 2025	Indikator Sasaran Renja Tahun 2025	Satuan	Target	Formulasi	Program
									DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
				Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	%	3,71	Jumlah unit usaha yang berdaya saing dibagi jumlah seluruh umkm dikalikan 100 %	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	7. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	8. Pelayanan PD yang adaptif, transparan dan inovatif	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	%	100	Jumlah indikator kinerja PD yang mencapai target dibagi jumlah keseluruhan indikator kinerja PD dikalikan 100 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

### 3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan Kegiatan Renja tahun 2025 mempertimbangkan amanat prioritas nasional, provinsi, dan Kabupaten Jepara tahun 2025 dikaitkan dengan tugas dan fungsi PD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dalam RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah :

1. Tema pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2025 : Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh.
2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2025 :
  - Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi.
  - Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam.
  - Mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal.
  - Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital.
  - Meningkatkan nilai investasi.
  - Akselerasi pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri.
  - Penguatan, kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan.
  - Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
3. Pencapaian SDGs, dimana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung pencapaian tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yg Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yg Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua) dengan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial;
4. Pengentasan kemiskinan dengan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dan Program Hubungan Industrial
5. Pengentasan Pengangguran dengan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan Program Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Mikro (UMKM), dan Program Pengembangan UMKM.

7. Hasil DKT/Musrenbangcam : Setelah melalui proses penyaringan usulan yang dapat meningkatkan capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan adalah 3 usulan hasil Musrenbangcam, yaitu Desa Papasan, Karimunjawa, dan Desa Gemiring Kidul.

Berdasarkan penelaahan Kebijakan umum, tujuan, sasaran dan bahan-bahan pertimbangan tersebut diusulkan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi,UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang kami susun dalam 11 program yang terdiri dari 23 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 9.458.146.065,- terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 7.706.080.065,- (termasuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 6.136.535.359,- dan Honor Non ASN sebesar Rp. 608.090.000,-), DBHCHT sebesar Rp. 1.291.834.000,- dan DAK NON FISIK sebesar Rp. 460.232.000,-

Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 10.138.811.000,-. Adanya perbedaan penganggaran antara rancangan awal RKPD dan menurut hasil analisis kebutuhan di karenakan adanya pengurangan dan penghapusan anggaran pada beberapa subkegiatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan prioritas Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 yang menunjang langsung pencapaian IKU Kabupaten, IKK, IKU PD, SDGs, selengkapnya dalam tabel berikut :

**Tabel III.3**  
**Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan**  
**Transmigrasi tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026**  
**Kabupaten Jepara**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.381.601.359			10.758.000.000	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.419.834.000			2.608.000.000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih		2,79 %	1.369.334.000		2,83 %	1.825.000.000	
2	07	03	201		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		332 orang	1.361.834.000		572 orang	1.700.000.000	
2	07	03	201	0001	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>		332 orang	1.361.834.000		572 orang	1.700.000.000	Diskopukmna kertrans Kab. Jepara
2	07	03	202		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		9 lembaga	2.500.000		9 lembaga	40.000.000	
2	07	03	202	0001	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>		9 lembaga	2.500.000		9 lembaga	40.000.000	Diskopukmna kertrans Kab. Jepara

2	07	03	203		<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>TerlaksananyaP erizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>		<b>9 perizinan</b>	<b>2.500.000</b>		<b>9 perizinan</b>	<b>40.000.000</b>	
2	07	03	203	0001	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>		<i>9 perizinan</i>	<i>2.500.000</i>		<i>9 perizinan</i>	<i>40.000.000</i>	Diskopukmna kertrans Kab. Jepara
2	07	03	204		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>1 perusahaan</b>	<b>2.500.000</b>		<b>4 perusahaan</b>	<b>45.000.000</b>	
2	07	03	204	0001	<i>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</i>	<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>		<i>1 perusahaan</i>	<i>2.500.000</i>		<i>4 perusahaan</i>	<i>45.000.000</i>	Diskopukmna kertrans Kab. Jepara
2	07	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan		<b>8,31 %</b>	<b>27.500.000</b>		<b>8,51 %</b>	<b>500.000.000,00</b>	
2	07	04	201		<b>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan Kesempatan kerja</b>		<b>7.600orang</b>	<b>16.000.000</b>		<b>7.800 orang</b>	<b>235.000.000,00</b>	
2	07	04	2.01	0001	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-</i>		<i>30 Orang</i>	<i>2.000.000</i>		<i>80 Orang</i>	<i>45.000.000</i>	<i>Diskopukmnakertrans Kab. Jepara</i>

						<i>lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>								
2	07	04	201	0002	<i>Pelayanan antar kerja</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>		7400 Orang	2.500.000		7800 Orang	45.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara	
2	07	04	201	0003	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>		50 Orang	5.000.000		200 Orang	50.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara	
2	07	04	2.01	0004	<i>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>		10 Orang	2.500.000		40 Orang	45.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara	
2	07	04	201	0005	<i>Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>		20 Orang	4.000.000		60 Orang	50.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara	
2	07	04	203		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)</b>		<b>20.000 orang</b>	<b>2.500.000</b>		<b>20.000 orang</b>	<b>135.000.000</b>		
2	07	04	2.03	0002	<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)</i>		20.000 Orang	2.500.000		20.000 Orang	45.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara	

2	07	04	2.03	0003	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja		0 Orang	0		7.800 orang	90.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan</b>		<b>270 orang</b>	<b>9.000.000</b>		<b>240 orang</b>	<b>130.000.000</b>	
2	07	04	204	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		50 Orang	2.500.000		120 Orang	45.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		200 Orang	2.500.000		100 Orang	40.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		20 Orang	4.000.000		20 Orang	45.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	07	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit</b>		<b>100 %</b>	<b>23.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>283.000.000</b>	
2	07	05	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)</b>		<b>50 perusahaan</b>	<b>12.649.000</b>		<b>237 perusahaan</b>	<b>112.000.000</b>	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jml Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan PP		25 perusahaan	2.062.000		85 perusahaan	40.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara

						yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online							
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang memiliki PKB		0 perusahaan	0		7 perusahaan	12.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	7	5	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		25 laporan	10.587.000		145 laporan	60.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan</b>		<b>55 perkara</b>	<b>10.351.000</b>		<b>45 perkara</b>	<b>171.000.000</b>	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah		25 perkara	3.584.000		25 perkara	45.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yg terselesaikan		30 perkara	5.442.000		45 perkara	35.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg diverifikasi		0 Asosiasi dan SP/SB	0		56 Asosiasi dan SP/SB	25.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara

2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 lembaga	1.325.000		2 lembaga	60.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		0 orang	0		350 orang	6.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>							10.368.000.000	
2	17	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		100 %	6.136.535.359		100 %	7.000.000.000	
2	17	01	202		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun</b>		14 dokumen	6.136.535.359		2 dokumen	7.000.000.000	
2	17	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		54 Orang/bulan	6.136.535.359		54 Orang/bulan	7.000.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara
2	17	05			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas</b>		6,9 %	243.776.000		7,7 %	40.000.000	
2	17	05	201		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi</b>		120 orang	243.776.000		20 orang	40.000.000	
2	17	05	201	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		120 orang	243.776.000		200 orang	40.000.000	Diskopukmnakertrans Kab. Jepara

2	17	06	201	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	15 unit usaha	15.000.000	15.000.000	187 unit usaha	130.000.000	
2	17	06	201		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>	<b>30 %</b>	<b>15.000.000</b>		<b>30 %</b>	<b>130.000.000</b>	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	0 unit usaha	0	0	105 unit usaha	45.000.000	Diskopukmna kertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	0 unit usaha	0	0	75 unit usaha	85.000.000	Diskopukmna kertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	75 unit usaha	216.456.000	216.456.000	180 unit usaha	260.000.000	
2	17	07	2.01		<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran</b>	<b>0,72 %</b>	<b>216.456.000</b>		<b>0,82 %</b>	<b>380.000.000</b>	

2	17	07	2.01	0015	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>		<i>75 orang</i>	<i>216.456.000</i>		<i>75 orang</i>	<i>250.000.000</i>	<i>Diskopukmna kertrans Kab. Jepara</i>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri</b>		<b>1,96 %</b>	<b>350.000.000</b>		<b>2,06 %</b>	<b>600.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>08</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Usaha mikro yang naik kelas</b>		<b>175 unit usaha</b>	<b>350.000.000</b>		<b>677 unit usaha</b>	<b>600.000.000</b>	
2	17	8	2.01	0002	<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>	<i>Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi</i>		<i>175 unit usaha</i>	<i>350.000.000</i>		<i>677 unit usaha</i>	<i>600.000.000</i>	<i>Diskopukmnakertrans Kab. Jepara</i>
<b>TOTAL</b>									<b>8.381.601.359</b>			<b>10.758.000.000</b>	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Program Kegiatan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 sebagaimana tersebut di bawah ini :

#### **A. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, dengan kegiatan:**

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan subkegiatan:
  - a) *Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*
3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan sub kegiatan:
  - a) *Penyediaan Sumber Daya Perizinan lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi*
4. Konsultasi Produktivitas pada perusahaan Kecil, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pelaksanaan Konsultasi produktivitas kepada Perusahaan Kecil'*

#### **B. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan:**

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) *Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja*
  - b) *Pelayanan Antar Kerja*
  - c) *Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja*
  - d) *Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan*
  - e) *Perluasan Kesempatan Kerja*
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) *Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia*
  - b) *Penyediaan Layanan Terpadu pada calon pekerja migran*
  - c) *Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*

#### **C. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, dengan kegiatan:**

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:

- a) *Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan*
  - b) *Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan*
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota, dengan sub kegiatan:
- a) *Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kabupaten/Kota*
  - b) *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kab./Kota*
  - c) *Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab./Kota*

**D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
  - b) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
  - b) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
  - c) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
  - d) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
  - e) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
  - f) *Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD*
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
  - b) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
  - b) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

**E. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, dengan kegiatan:**

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;*

**F. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, dengan kegiatan:**

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota*

**G. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, dengan kegiatan:**

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*

**H. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, dengan kegiatan:**

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota*

**I. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), dengan kegiatan:**

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro*
  - b) *Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro*
  - c) *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan*

**J. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, dengan kegiatan:**

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan:
  - a) *Pengembangan Usaha Mikro*

**K. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan:**

1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
  - a) *Penjajakan ke calon penempatan Transmigran*
  - b) *Penampungan Kab/kota*

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, lokasi dan kebutuhan pagu indikatif yang dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut :

**Tabel IV.1**  
**Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan**  
**Transmigrasi tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026**  
**Kabupaten Jepara**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.456.146.065			12.976.000.000	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.419.834.000			2.608.000.000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih		2,79 %	1.369.334.000		2,83 %	1.825.000.000	
2	07	03	201		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		332 orang	1.361.834.000		572 orang	1.700.000.000	
2	07	03	201	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		332 orang	1.361.834.000		572 orang	1.700.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	03	202		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		9 lembaga	2.500.000		9 lembaga	40.000.000	
2	07	03	202	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		9 lembaga	2.500.000		9 lembaga	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	07	03	203		<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>TerlaksananyaP erizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>		<b>9 perizinan</b>	<b>2.500.000</b>		<b>9 perizinan</b>	<b>40.000.000</b>	
2	07	03	203	0001	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>		<i>9 perizinan</i>	<i>2.500.000</i>		<i>9 perizinan</i>	<i>40.000.000</i>	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	03	204		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		<b>1 perusahaan</b>	<b>2.500.000</b>		<b>4 perusahaan</b>	<b>45.000.000</b>	
2	07	03	204	0001	<i>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</i>	<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>		<i>1 perusahaan</i>	<i>2.500.000</i>		<i>4 perusahaan</i>	<i>45.000.000</i>	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan		<b>8,31 %</b>	<b>27.500.000</b>		<b>8,51 %</b>	<b>500.000.000,00</b>	
2	07	04	201		<b>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan Kesempatan kerja</b>		<b>7.600orang</b>	<b>16.000.000</b>		<b>7.800 orang</b>	<b>235.000.000,00</b>	
2	07	04	2.01	0001	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-</i>		<i>30 Orang</i>	<i>2.000.000</i>		<i>80 Orang</i>	<i>45.000.000</i>	<i>Diskopukm nakertrans Kab. Jepara</i>

						<i>lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>							
2	07	04	201	0002	<i>Pelayanan antar kerja</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>		7400 Orang	2.500.000		7800 Orang	45.000.000	<i>Diskopukm nakertrans Kab. Jepara</i>
2	07	04	201	0003	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>		50 Orang	5.000.000		200 Orang	50.000.000	<i>Diskopukm nakertrans Kab. Jepara</i>
2	07	04	2.01	0004	<i>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>		10 Orang	2.500.000		40 Orang	45.000.000	<i>Diskopukm nakertrans Kab. Jepara</i>
2	07	04	201	0005	<i>Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>		20 Orang	4.000.000		60 Orang	50.000.000	<i>Diskopukm nakertrans Kab. Jepara</i>
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>203</b>		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)</b>		<b>20.000 orang</b>	<b>2.500.000</b>		<b>20.000 orang</b>	<b>135.000.000</b>	
2	07	04	2.03	0002	<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)</i>		20.000 Orang	2.500.000		20.000 Orang	45.000.000	<i>Diskopukm nakertrans Kab. Jepara</i>

2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		0 Orang	0		7.800 orang	90.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>204</b>		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan</b>		<b>270 orang</b>	<b>9.000.000</b>		<b>240 orang</b>	<b>130.000.000</b>	
2	07	04	204	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		50 Orang	2.500.000		120 Orang	45.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		200 Orang	2.500.000		100 Orang	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	04	204	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		20 Orang	4.000.000		20 Orang	45.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit</b>		<b>100 %</b>	<b>23.000.000</b>		<b>100 %</b>	<b>283.000.000</b>	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)		50 perusahaan	12.649.000		237 perusahaan	112.000.000	

2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jml Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP Online		25 perusahaan	2.062.000		85 perusahaan	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang memiliki PKB		0 perusahaan	0		7 perusahaan	12.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	7	5	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		25 laporan	10..587.000		145 laporan	60.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan</b>		<b>55 perkara</b>	<b>10.351.000</b>		<b>45 perkara</b>	<b>171.000.000</b>	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah		25 perkara	3.584.000		25 perkara	45.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yg terselesaikan		30 perkara	5.442.000		45 perkara	35.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg diverifikasi		0 Asosiasi dan SP/SB	0		56 Asosiasi dan SP/SB	25.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 lembaga	1.325.000		2 lembaga	60.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		0 orang	0		350 orang	6.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>							<b>10.368.000.000</b>	
2	'17	'01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100 %</b>	<b>7.176.080.065</b>		<b>100 %</b>	<b>9.053.000.000</b>	
2	'17	'01	201		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun</b>		<b>7 dokumen</b>	<b>15.000.000</b>		<b>7 dokumen</b>	<b>36.000.000</b>	
2	'17	'01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	5.000.000		2 Dokumen	5.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0		1 Dokumen	3.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	'17	'01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0		1 Dokumen	2.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	0		1 Dokumen	2.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	0		1 Dokumen	2.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	0		1 Dokumen	2.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	20.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

<b>2</b>	<b>'17</b>	<b>'01</b>	<b>202</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun</b>		<b>14 dokumen</b>	<b>6.136.535.359</b>		<b>2 dokumen</b>	<b>7.000.000.000</b>	
2	'17	'01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		54 Orang/bulan	6.136.535.359		54 Orang/bulan	7.000.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>'17</b>	<b>'01</b>	<b>205</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun</b>		<b>0 dokumen</b>	<b>0</b>		<b>8 dokumen</b>	<b>100.000.000</b>	
2	'17	'01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0 orang	0		8 orang	100.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>'17</b>	<b>'01</b>	<b>206</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun</b>		<b>6 dokumen</b>	<b>143.200.00</b>		<b>6 dokumen</b>	<b>377.000.000</b>	
2	'17	'01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.000.000		1 Paket	17.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	30.000.000		1 Paket	60.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	10.000.000		1 Paket	15.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara

2	'17	'01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000		1 Paket	23.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3.000.000		1 Paket	12.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	85.200.000		30 Laporan	250.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>207</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>5 unit</b>	<b>18.687.800</b>		<b>23 unit</b>	<b>360.000.000</b>	
2	'17	'01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0		1 paket	60.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	18.687.800		23 Unit	250.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan		0 Unit	0		1 unit	50.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>'17</b>	<b>'01</b>	<b>208</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun</b>		<b>24 laporan</b>	<b>728.090.000</b>		<b>24 laporan</b>	<b>680.000.000</b>	

2	'17	'01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	120.000.000		12 laporan	140.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	608.090.000		12 laporan	540.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>'17</b>	<b>'01</b>	<b>209</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>134.566.906</b>	<b>134.566.906</b>		<b>127 unit</b>	<b>500.000.000</b>	
2	'17	'01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64.925.800	64.925.800		25 Unit	70.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		0	350.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	'17	'01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69.641.106	69.641.106		100 Unit	80.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan</b>	<b>46 %</b>	<b>20.000.000</b>		<b>50 %</b>	<b>85.000.000</b>	

						<b>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>03</b>	<b>201</b>			<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pemuktahiran data koperasi</b>		<b>55 unit usaha</b>	<b>20.000.000</b>		<b>301 unit usaha</b>	<b>85.000.000</b>
2	17	03	201	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		55 unit usaha	20.000.000		301 unit usaha	85.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>04</b>				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Sehat</b>		<b>80 %</b>	<b>15.000.000</b>		<b>82 %</b>	<b>80.000.000</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>04</b>	<b>201</b>			<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi Sehat</b>		<b>30 unit usaha</b>	<b>15.000.000</b>		<b>233 unit usaha</b>	<b>80.000.000</b>
2	17	04	201	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		30 unit usaha	15.000.000		233 unit usaha	80.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>05</b>				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas</b>		<b>6,9 %</b>	<b>243.776.000</b>		<b>7,7 %</b>	<b>40.000.000</b>

2	17	05	201		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi</b>		<b>120 orang</b>	<b>243.776.000</b>		<b>20 orang</b>	<b>40.000.000</b>	
2	17	05	201	0001	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>		120 orang	243.776.000		20 orang	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	06			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>		<b>30 %</b>	<b>15.000.000</b>		<b>30 %</b>	<b>130.000.000</b>	
2	17	06	201		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri</b>		<b>15 unit usaha</b>	<b>15.000.000</b>		<b>187 unit usaha</b>	<b>130.000.000</b>	
2	17	06	201	0009	<i>Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>		15 unit usaha	15.000.000		214 unit usaha	130.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07			<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran</b>		<b>0,72 %</b>	<b>216.456.000</b>		<b>0,82 %</b>	<b>380.000.000</b>	
2	17	07	2.01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,</b>	<b>Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses</b>		<b>75 unit usaha</b>	<b>216.456.000</b>		<b>180 unit usaha</b>	<b>260.000.000</b>	

					<b>Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/</b>	<b>pembiayaan dan pemasaran</b>							
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro		0 unit usaha	0		105 unit usaha	45.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan		0 unit usaha	0		75 unit usaha	85.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
2	17	07	2.01	0015	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>		75 orang	216.456.000		75 orang	250.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri</b>		<b>1,96 %</b>	<b>350.000.000</b>		<b>2,06 %</b>	<b>600.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>08</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Usaha mikro yang naik kelas</b>		<b>175 unit usaha</b>	<b>350.000.000</b>		<b>677 unit usaha</b>	<b>600.000.000</b>	
2	17	8	2.01	0002	<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>	<i>Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi</i>		175 unit usaha	350.000.000		677 unit usaha	600.000.000	<i>Diskopukm nakertrans Kab. Jepara</i>
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>2.000.000</b>			<b>73.000.000</b>	
<b>3</b>	<b>32</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				<b>2.000.000</b>			<b>73.000.000</b>	
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Rasio peningkatan jumlah transmigran</b>		<b>33,33 %</b>	<b>2.000.000</b>		<b>25 %</b>	<b>73.000.000</b>	
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>03</b>	<b>201</b>		<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah KK yang berangkat</b>		<b>2 KK</b>	<b>2.000.000</b>		<b>5 KK</b>	<b>73.000.000</b>	

3	32	03	201	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan		1 lokasi	1.534.000		1 lokasi	40.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
3	32	03	201	0015	Penampungan Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang ditampung di penampungan kabupatenDaerah asal		2 Kepala Keluarga	466.000		5 Kepala Keluarga	8.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
3	32	03	201	0018	Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan kabupaten/kota sampai ke lokasi		2 Kepala Keluarga	0		5 Kepala Keluarga	25.000.000	Diskopukm nakertrans Kab. Jepara
<b>TOTAL</b>									<b>9.458.146.065</b>			<b>13.049.000.000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memegang peranan penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di daerah, Renja tahun 2025 pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sangat berarti bila pelaksanaannya sesuai dengan target pencapaian baik anggaran maupun kinerja. Renja juga digunakan sebagai pengusulan anggaran dan kegiatan pada APBD Kabupaten, acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025, sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan dan plafon APBD, juga digunakan pelaksanaan kegiatan tahunan perangkat daerah dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2025. Penyajian dokumen ini diharapkan dapat mencerminkan nuansa pemerataan pembangunan sesuai skala prioritas, dengan pengelolaan dan penanganan secara prioritas untuk mencapai hasil yang optimal sesuai anggaran yang tersedia.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya selain itu juga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah dirumuskan dalam Renja maupun pada Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Diharapkan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang merupakan salah satu dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah mampu mengarahkan kebijakan dan program yang pencapaiannya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dan peran serta/partisipasi masyarakat dari semua *stakeholder* dan atau semua pihak yang berkepentingan.

Diharapkan hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan maka diperlukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun 2025.

Jepara, 5 Juli 2024  
KEPALA DINAS KOPERASI,UKM,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN JEPARA



**SAMIADJI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690509 199102 1002